

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Melalui pembahasan ini, penulis telah menyajikan hasil penelitian yang sesuai dengan kondisi lapangan saat penelitian berlangsung dan diolah sesuai regulasi yang mengatur pengelolaan kinerja, yaitu Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Langkah-langkah yang diambil dalam menyajikan data termasuk menjabarkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai rumusan masalah serta mengidentifikasi tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi e-government berbasis aplikasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

Hasil penelitian ini didasarkan pada analisis dari setiap aspek model analisis Mustafa et al. (2021), yaitu kesiapan teknologi, kapabilitas sumber daya manusia, dukungan kebijakan, partisipasi publik, serta kepercayaan dan keamanan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa wawancara mendalam dengan empat informan kunci serta telaah dokumen terkait implementasi e-government.

Wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem e-government di BPBD DKI Jakarta, serta untuk merumuskan perbaikan dalam penerapannya. Wawancara dilakukan pada bulan Mei 2024, dengan hasil penelitian diperoleh dari analisis data lapangan yang diolah sesuai metodologi penelitian.

1. Akses

Kesiapan Teknologi Sistem E-Government

Dapat disimpulkan bahwa kesiapan teknologi adalah landasan penting dalam penerapan e-government di BPBD DKI Jakarta dengan Sistem Informasi Manajemen Bencana (SIMBA) menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang

memadai dan modern, seperti jaringan internet yang luas, perangkat keras yang memadai, dan perangkat lunak yang tepat, sering kali tidak tersedia secara merata di seluruh wilayah. Meskipun SIMBA dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang seharusnya mudah diakses oleh semua pegawai dari berbagai tingkat usia dan latar belakang keahlian, kenyataannya tidak semua pegawai memiliki keterampilan atau akses yang memadai untuk memanfaatkan sistem ini secara optimal. Manajemen akses dalam SIMBA, meskipun diatur sesuai dengan jabatan pengguna, sering kali menghadapi tantangan dalam pengawasan berkala untuk memastikan efektivitas dan keandalan sistem. Kendala teknis yang dihadapi juga tidak selalu dapat diselesaikan dengan mekanisme yang disediakan, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan infrastruktur dan pelatihan yang lebih komprehensif.

2. Sumber Daya Manusia

Kapabilitas Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dalam menggunakan SIMBA, BPBD DKI Jakarta telah berusaha untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dalam menggunakan SIMBA melalui pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) yang terjadwal dan berkelanjutan. Bimtek ini didesain untuk mengakomodasi perbedaan kompetensi antara petugas back office dan petugas lapangan. Meskipun demikian, kesenjangan dalam penyamaan kompetensi di antara petugas dengan latar belakang yang beragam tetap menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun ada rencana pelatihan penyegaran untuk memastikan penguasaan SIMBA terus terjaga dan berkembang, efektivitas dari upaya ini belum sepenuhnya terbukti karena penilaian kinerja dengan indikator yang jelas masih menghadapi berbagai kendala. Penyesuaian dan kalibrasi pengetahuan secara berkelanjutan memang terus dilakukan, namun upaya ini harus lebih intensif untuk benar-benar menyamakan kompetensi di antara semua petugas.

Partisipasi Publik

SIMBA telah membantu BPBD DKI Jakarta dalam mengolah data dan informasi secara lebih efisien dan efektif. Aplikasi ini memungkinkan integrasi data antara petugas di lapangan dengan pusat, mengurangi duplikasi kerja, dan meningkatkan koordinasi di lapangan. Integrasi dengan berbagai aplikasi lain, seperti BMKG dan Pantau Banjir, telah meningkatkan fungsionalitas dan cakupan informasi SIMBA. Pendapat karyawan terhadap implementasi SIMBA sangat positif, dengan sistem ini menggantikan sistem sebelumnya yang tidak dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja di BPBD.

3. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar

Dukungan Kebijakan

Regulasi penerapan SIMBA telah dirancang dengan tujuan agar sistem ini sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), namun terdapat kesenjangan yang perlu diperhatikan. Asumsinya adalah bahwa dasar hukum yang kuat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan penggunaan SIMBA. Namun, tanpa adanya peraturan gubernur atau peraturan kepala BPBD yang secara tegas menetapkan SIMBA sebagai satu-satunya sistem informasi bencana yang digunakan BPBD, keberlanjutan ini masih diragukan. Keamanan siber memang menjadi perhatian utama, tetapi tanpa koordinasi yang optimal dengan Dinas Kominfo, ada risiko keamanan data yang tidak tertangani dengan baik. Selain itu, meskipun rencana pengembangan SIMBA mencakup peningkatan kualitas dan keterjangkauan akses serta integrasi dengan berbagai aplikasi pemerintah lainnya, implementasi yang efektif dan merata masih menjadi tantangan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan rencana sudah ada, pelaksanaan yang konsisten dan koordinasi yang kuat masih diperlukan untuk mencapai tujuan optimal.

Kepercayaan dan Keamanan

Dapat disimpulkan bahwa BPBD DKI Jakarta menggunakan SIMBA sebagai sistem informasi bencana utama, sedangkan aplikasi Siaga 112 yang terintegrasi dengan SIMBA disediakan untuk masyarakat umum. Pengembangan SIMBA ke depan diharapkan mencakup penguatan dasar hukum, peningkatan fitur, integrasi dengan sistem lain, dan peningkatan keamanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap e-government dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Meski SIMBA menunjukkan kesiapan teknologi yang baik dengan infrastruktur TIK yang memadai dan manajemen akses yang terstruktur, masih ada kesenjangan dalam kapabilitas sumber daya manusia dan integrasi dengan aplikasi pemerintah lainnya. Peningkatan kapabilitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, dukungan kebijakan yang kuat, dan integrasi yang lebih baik akan memperkuat implementasi SIMBA, meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, dan pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat akan meningkat dengan upaya peningkatan keamanan dan transparansi data.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian implementasi e-government berbasis aplikasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melalui aplikasi SIMBA, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Akses

Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Peningkatan Infrastruktur Teknologi sangat penting bagi BPBD DKI Jakarta untuk memastikan kinerja aplikasi SIMBA yang optimal. Pertama, perlu dilakukan upgrade infrastruktur dengan mengembangkan dan memperbarui jaringan internet, perangkat keras, dan perangkat lunak. Hal ini membutuhkan alokasi anggaran yang cukup setiap tahun untuk pemeliharaan dan pembaruan.

Selain itu, penggunaan teknologi terkini seperti cloud computing dapat membantu meningkatkan skalabilitas dan keandalan aplikasi, memungkinkan akses data yang lebih cepat dan efisien.

Pengembangan fitur dan integrasi juga merupakan aspek penting. Salah satu contohnya adalah mengembangkan fitur notifikasi yang lebih canggih dalam SIMBA. Fitur ini bisa berupa notifikasi otomatis untuk berbagai jenis bencana dan risiko di wilayah tertentu, sehingga pengguna dapat lebih cepat tanggap. Selain itu, peningkatan kapasitas analitik SIMBA juga penting untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih baik.

2. Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia melibatkan pelatihan berkala dan sertifikasi kompetensi. Pelatihan berkala diadakan untuk seluruh pegawai BPBD, baik yang bekerja di lapangan maupun di kantor, guna memastikan mereka selalu up-to-date dengan fitur-fitur terbaru dari SIMBA. Pelatihan ini mencakup penggunaan aplikasi, input data, dan validasi data. Selain itu, diperkenalkan sertifikasi resmi untuk pegawai yang telah mengikuti pelatihan SIMBA, sehingga standar kompetensi dapat diakui dan diukur dengan jelas.

Peningkatan Partisipasi Publik

Peningkatan partisipasi publik dilakukan melalui integrasi dengan aplikasi lain dan edukasi publik. Integrasi SIMBA dengan aplikasi lain yang relevan, seperti aplikasi dari BMKG dan BNPB, ditingkatkan untuk menyediakan informasi yang lebih komprehensif dan real-time kepada masyarakat. Kampanye edukasi diadakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang aplikasi SIMBA dan Siaga 112, sehingga mereka dapat memanfaatkannya secara optimal dalam melaporkan kejadian bencana dan mendapatkan informasi peringatan dini.

3. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar

Penguatan Dukungan Kebijakan

Penguatan dukungan kebijakan sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas penggunaan SIMBA sebagai sistem informasi bencana resmi oleh BPBD. Maka dari itu, perlu adanya regulasi yang kuat, seperti peraturan gubernur atau peraturan kepala BPBD, yang menetapkan SIMBA sebagai satu-satunya sistem informasi bencana yang digunakan oleh BPBD. Hal ini penting untuk memastikan SIMBA tetap digunakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Lalu, dukungan anggaran yang memadai sangat krusial untuk pengembangan dan pemeliharaan SIMBA. Anggaran ini harus mencakup penambahan fitur baru, perbaikan desain aplikasi, dan pembaruan perangkat keras.

Peningkatan Kepercayaan dan Keamanan

Selain itu, peningkatan kepercayaan dan keamanan juga menjadi prioritas. Keamanan data harus diperkuat dengan terus melakukan pengujian dan pembaruan sistem keamanan untuk melindungi data dari ancaman siber. Dalam hal ini, kerjasama yang erat dengan Dinas Kominfo sangat penting. Di samping itu, meningkatkan akurasi dan transparansi data adalah langkah yang tidak kalah penting. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan mekanisme validasi data yang ketat serta memastikan bahwa semua input data dilakukan oleh pengguna yang kompeten.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, BPBD DKI Jakarta dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasionalnya melalui aplikasi SIMBA, serta memperkuat kepercayaan dan partisipasi publik dalam upaya penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah :

- Andrianto, Nico. 2007. *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government*. Malang: Banyumedia Publishing
- A Rijali, (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Astuti, Sri Yuni Woro. 2004. Peluang dan Tantangan Penerapan E-governance Dalam Konteks Otonomi Daerah. *Jurnal. Fisip Universitas Airlangga*.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta. (2019). *Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana 2019-2023*.
- Bugin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Chen, Yu-Che and Richard Knepper. 2005. *Digital Government Development Strategies: Lessons for Policy Makers from a Comparative Perspective*, in *Electronic Government Strategies and Implementation* (Wayne Huang, Keng Siau, and Kwok Kee Wei, eds. pp.394-420) USA: IDEA Group Publishing.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. USA: SAGE.
- Depkominfo. 2005. *Peluang Indonesia Untuk Bangkit Melalui Implementasi EGovernment*. Laguboti: Toba.
- Effendi, Sofyan. 2004. *Paradigma Pembangunan Kelembagaan Publik dan Reinventing Government*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Eko Prasajo, Aditya Perdana, Nor Hiqmah. 2006. *Kinerja Pelayanan Publik Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Keterlibatan dan Partisipasi dalam Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan*. Jakarta: Yappika.
- Esteves, J.; Joseph, R. C. (2008). *A comprehensive framework for the assessment of egovernment project.*, 25(1), 118-132.
- Husni, Muhammad. 2006. *Analisis Penerapan Electronic Government di Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *e-Government in Action*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Karin Afriani & Fathul Wahid (2009). *Dampak E-Government pada Good Governance: Temuan Empiris dari Kota Jambi*.
- Mariano, Sabino. 2018. *Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo*
- Pudyatmoko. 2008. *Upaya Meningkatkan fektifitas Electronic Government pada Badan Meteorologi dan Geofisika*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.
- Richardus Eko Indrajit. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan System Pelayanan Public Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siagian, & Sondang. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*

- Solihat, Lia Amalia. 2006. Peranan E-government dalam Mendukung Transparansi BUMN: Studi Kasus BUMN Online pada Kementrian Negara BUMN RI. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit. Alfabeta, Bandung.
- Dharmayana, I. M. A., & Rahanatha, G. B. (2017).
- Sumarno Alim, "Hakikat Pengembangan" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.6
- Susanto, H., & Irwansyah, H. (2021). E-Government Application for Disaster Management. In Proceedings of the International Conference on Informatics and Computing (ICIC) (pp. 126-131).

Undang Undang :

- Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)
- Instruksi Presiden No . 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah landasan hukum utama bagi implementasi e-government di Indonesia.
- Peraturan Menteri No.28 tahun 2006 tentang pembuatan domain dengan penggunaan ekstensi go.id

Buku :

- Ahmad Juliarso (2019). Analisis Implementasi E-Goverment Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik. Jurnal ilmu administrasi
- Etin Indrayani (2016). E-Government, Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia. Deepublish
- I Nyoman Trisantosa (2022). Pelayanan Publik Berbasis Digital. Deepublish
- Miftah Thoha (1999). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer
- Riris Katharina (2020). Pelayanan Publik dan Pemerintah Digital Indonesia. Perpustakaan Nasional
- Dadan Zaliludin (2020). Implementasi E-Goverment Berbasis Android. Perpustakaan Nasional